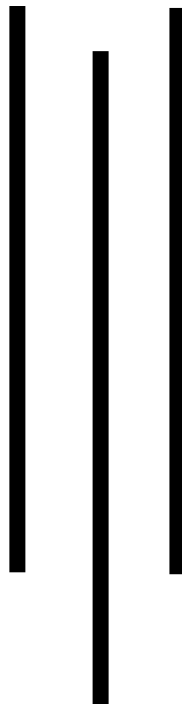




LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L A K I P)
TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KATINGAN

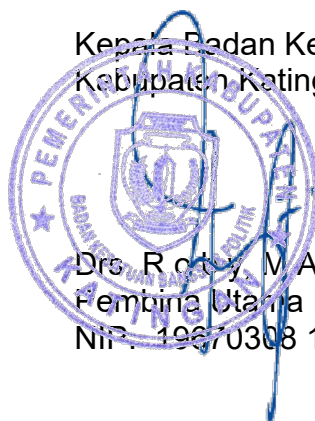
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemampuan dan pola pikir yang baik, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2024 ini telah tersusun sesuai rencana dan jadwal yang telah ditentukan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007, sebagaimana upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilar yang berkesinambungan maka pada Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan selaku Kepala Daerah. Penyusunan LAKIP ini telah mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan apabila terdapat kekurangan dari penyusunan laporan ini mohon kiranya dapat dimaklukkan oleh karna keterbatasan. Sekian dan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Katingan,



Drs. R. R. R. M. A. P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670308 199203 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan menyusun Rencana Strategi (Renstra) untuk tahun 2024 – 2026 pada pelaksanaan pemerintahan selama tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tersebut. Tahap penting lain dalam akuntabilitas kinerja yaitu pengukuran dan pelaporan kinerja. Dalam laporan kinerja ini disajikan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2024 sebanyak 2 (dua), yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh kebijakan dan program yang selengkapny dapat dilihat pada Bab II atau pada lampiran perencanaan strategis (PS). Pada Bab III Capaian kinerja sasaran menunjukkan hasil yang baik, hal itu tidak lepas dari kebijakan yang diambil dan pelaksanaan program – program dan kegiatan.

Analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan sementara ini masih dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Agar Laporan Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah (LAKIP) dapat ditingkatkan manfaatnya, maka pada tahun yang akan datang dikembangkan suatu sistem pengukuran kinerja, sehingga dapat dilakukan berbagai analisis keberhasilan program dan kebijakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2. Keadaan Pegawai	3
1.3. Isu-isu Strategis	5
1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana	6
1.5. Keuangan	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Perjanjian Kinerja	12
2.3 Perubahan Anggaran	13
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	18
BAB IV	
PENUTUPAN	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel I.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	4
Tabel I.3 Ringkasan Anggaran Tahun 2024	7
Tabel II.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabuapeten Katingan 2024-2026	9
Tabel II.2 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan	11
Tabel II.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel II.5 Target Belanja APBD-P Dinas/Badan Tahun 2024	14
Tabel II.6 Anggaran per Sasaran Strategis	14
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel III.3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	16
Tabel III.4 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis	16
Table III.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17
Tabel III.12 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan	17
Tabel III.15 Realisasi Anggaran Tahun 2024	19

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dilaksanakan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tahun 2023, di harapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten katingan di dalam pelaksanaan Program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan merumuskan kebijakan teknis, membina, melaksanakan koordinasi, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Katingan;

- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan fungsilainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Susunan organisasi pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis.



1.2. Keadaan Pegawai

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki daftar pegawai berdasarkan jabatan, Pangkat dan Golongan seperti yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel I.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pangkat / Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN/PNS)		
1.	Kepala Badan	Pembina Utama Muda (IV.c)	1 Orang
2.	Sekretaris Badan	Pembina Tingkat I / IV.b	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina / IV.a	1 Orang
		Penata Tingkat I / III.d	2 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	Penata Tingkat I / III.d	2 Orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Tingkat I / III.d	2 Orang
6.	Jabatan Fungsional Umum	Pembina / IV.a	1 Orang
		Penata Muda Tingkat I / III.b	1 Orang
		Pengatur / II.c	1 Orang
B.	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN/PPPK)		
1.	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Muda/IX	4 Orang
C.	NON-ASN		
1.	Operator Komputer	Pegawai Harian Lepas	9 orang
2.	Pramu Kebersihan	Pegawai Harian Lepas	5 orang
3.	Sopir Kepala Badan	Pegawai Harian Lepas	1 Orang

Berikut ini daftar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan disajikan pada tabel berikut.

Tabel I.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No	Jenis Pendidikan	Golongan						Jumlah
		IV	III	II	I	IX	-	
A.	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN/PNS)							
1.	Strata – II	2	1					3 orang
2.	Strata – I	3	4					7 orang
3.	Diploma – III		1					1 orang
4.	SMA / Sederajat			1				1 orang

B.	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN/PPPK)							
1.	Strata – I					4		4 orang
C.	NON-ASN							
1.	Strata – I						4	4 orang
2.	Diploma – III						1	1 orang
3.	SMA / Sederajat						10	10 orang
Jumlah		5	6	1	0	4	15	31 orang

1.3. Isu-isu Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang strategik yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang berkembang dimasyarakat yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Ada Beberapa isu-isu strategis yang sedang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya berasal dari dalam SOPD (internal) dan dari luar SOPD (eksternal) yaitu :

- 1) Isu strategis yang berasal dari Internal SOPD seperti :
 - Terjadi perubahan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD;
 - Terjadi perubahan kebijakan daerah tentang anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program/ kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan ;dan
 - Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD.
- 2) Isu Strategis yang berasal dari eksternal SOPD seperti :
 - Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan

kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- Perlu peningkatan dalam partisipasi partai politik, Ormas/LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi, kehidupan yang rukun dan damai;
- Masih adanya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Katingan yang tidak mendaftar untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.
- Rawan terjadinya konflik antara warga lokal baik dengan perusahaan perkebunan maupun perusahaan pertambangan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak lahan warga dan tanah adat;
- Keadaan masyarakat Kabupaten Katingan yang plural dan homogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial.
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam proses demokratis serta kerawanan konflik dalam proses Pemilu maupun Pilkada.
- Masih terdapat isu-isu yang bernuansa SARA yang beredar dikalangan masyarakat terkait nuansa Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres walaupun tahapannya baru akan dimulai dari tahun 2023 dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024.

1.4. Keadaan Sarana dan Prasaranan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. (Lampiran)

1.5. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.377.522.968,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 35.115.978.988,- dan belanja Modal sebesar Rp. 261.543.980,-.

Tabel I.3 Ringkasan Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	Rp. 35.115.978.988,-
2.	Belanja Modal	Rp. 261.543.980,-
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 35.377.522.968

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang alasan disusunnya LAKIP serta manfaatnya, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kondisi Pegawai, Isu-isu Strategis, Sarana dan Prasarana, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi, prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi, prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan menggunakan dasara pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Katingan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun .

RPD Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Katingan No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode tiga tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Katingan nomor 34 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapny dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kabupaten Katingan 2024 - 2026 sebagai berikut :

Tabel II.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabuapeten Katingan 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Daerah
1.	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.
2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan mendukung pada pencapaian Tujuan Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam yakni Meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan dan Sasaran Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 3 tahun anggaran adalah Meningkatkan keharmonisan dan kerukunan masyarakat telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Persentase Konflik yang ditangani	%	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Predikat	B	B	B

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
		5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun perjanjian kinerja perubahan karena terdapat perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti alokasi anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja Dinas/Badan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel II.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Predikat	B

2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dinas/Badan Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 35.177.522.968, dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi Rp 35.377.522.968.

2.3.1 Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Target belanja merupakan angka (jumlah) belanja yang direncanakan dan harus tercapai. Target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tunjukan pada tabel berikut.

Tabel II.5 Target Belanja APBD-P Dinas/Badan Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi		
➤ Belanja Pegawai	2.715.662.990	100
➤ Belanja Barang dan Jasa	3.795.495.998	100
➤ Belanja Hibah	28.604.820.000	100
Belanja Modal		
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.783.980	100
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.760.000	100
Jumlah	35.115.978.988	

Berdasarkan data tabel II.5 belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 35.115.978.988 dan belanja modal Rp. 261.543.980.

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel II.6 Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	%	Keterangan
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	31.206.321.494	100	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	4.171.201.474	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas/Badan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran. strategis Dinas/Badan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	%	100	100	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Predikat	B	B	100%

Pada tahun 2024, indikator jumlah konflik sosial yang ditangani tercapai sebesar 100% dan indikator Nilai Sakip tercapai sebesar 100%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas/Badan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk **setiap indikator kinerja** menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tabel III.3 Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Sasaran	2022			2023		2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	CC	B	100%	B	100%	B	B	100%

3.2.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel III.4 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel III.4 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)
1.	2019	100	100	100
2.	2020	100	100	100
3.	2021	100	100	100
4.	2022	100	100	100
5.	2023	100	100	100

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Jika ada).

3.2.4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Table III.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Program	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Persentase pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi pencasila dan karakter kebangsaan	100	88,92	-11,08
		Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	100	99,79	-0,21
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	100	99,47	-0,53
		Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	96,03	-3,79
		Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti	100	77,63	-22,37
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	100	77,93	-22,07

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel III.12 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

No	Sasaran Renstra	Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Persentase pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi pencasila dan karakter kebangsaan	85%	100%	100	88,92
		Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	90%	100%	100	99,79
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	85%	100%	100	99,47
		Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	85%	100%	100	96,03
		Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti	85%	100%	100	77,63
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	B	B	100	77,93

Dari Tabel III.12 dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2024 pada indikator program eksternal diatas 100%, dan realisasi kinerja di atas target dari reuiu Renstra 2024.

3.2.7 Dukungan Inovasi Dalam Pencapaian Kinerja (Jika ada)

Inovasi yang dilombakan setiap tahun bisa dimasukan

3.2.8 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan melaksanakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung capaian kinerja instansi yakni kolaborasi pada sektor sosial, sektor fisik, sektor ekonomi, sekretariat daerah dan kementren seperti: kolaborasi dengan bagian organisasi untuk kebijakan strategis, inspektorat untuk pengawasan internal, bagian kerjasama terkait kerjasama daerah, dan Bersama instansi di Pemerintah Kabupaten Katingan

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.00	9	10
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	4,171,201,474.00		3,250,486,170.00	77.93	100.00	920,715,304.00	22.07		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86,745,342.00		79,623,636.00	91.79	100.00	7,121,706.00	8.21		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86,745,342.00		79,623,636.00	91.79	100.00	7,121,706.00	8.21		
	- Belanja Operasi	86,745,342.00	3	79,623,636.00	91.79	100.00	7,121,706.00	8.21		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,715,662,990.00		1,966,885,698.00	72.43	100.00	748,777,292.00	27.57		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,715,662,990.00		1,966,885,698.00	72.43	100.00	748,777,292.00	27.57		
	- Belanja Operasi	2,715,662,990.00	15	1,966,885,698.00	72.43	100.00	748,777,292.00	27.57		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00		20,000,000.00	66.67	100.00	10,000,000.00	33.33		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,000,000.00		20,000,000.00	66.67	100.00	10,000,000.00	33.33		
	- Belanja Operasi	30,000,000.00	1	20,000,000.00	66.67	100.00	10,000,000.00	33.33		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634,947,074.00		616,629,659.00	97.12	100.00	18,317,415.00	2.88		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,808,673.00		35,780,813.00	97.21	100.00	1,027,860.00	2.79		
	- Belanja Operasi	36,808,673.00	1	35,780,813.00	97.21	100.00	1,027,860.00	2.79		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72,351,000.00		69,105,000.00	95.51	100.00	3,246,000.00	4.49		
	- Belanja Operasi	72,351,000.00	2	69,105,000.00	95.51	100.00	3,246,000.00	4.49		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,954,230.00		37,668,176.00	99.25	100.00	286,054.00	0.75		
	- Belanja Operasi	37,954,230.00	1	37,668,176.00	99.25	100.00	286,054.00	0.75		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Bahan/Material	162,883,171.00		149,459,400.00	91.76	100.00	13,423,771.00	8.24		
	- Belanja Operasi	162,883,171.00	2	149,459,400.00	91.76	100.00	13,423,771.00	8.24		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324,950,000.00		324,616,270.00	99.90	100.00	333,730.00	0.10		
	- Belanja Operasi	324,950,000.00	1	324,616,270.00	99.90	100.00	333,730.00	0.10		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									

NO	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.00	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284,713,068.00		260,807,071.00	91.60	100.00	23,905,997.00	8.40		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,953,068.00		30,440,991.00	98.35	100.00	512,077.00	1.65		
	- Belanja Operasi	169,088.00	1	0.00	0.00	0.00	169,088.00	100.00		
	- Belanja Modal	30,783,980.00	3	30,440,991.00	98.89	100.00	342,989.00	1.11		
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,760,000.00		230,366,080.00	90.78	100.00	23,393,920.00	9.22		
	- Belanja Operasi	23,000,000.00	2	22,800,000.00	99.13	100.00	200,000.00	0.87		
	- Belanja Modal	230,760,000.00	1	207,566,080.00	89.95	100.00	23,193,920.00	10.05		
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,251,500.00		93,527,432.00	58.36	100.00	66,724,068.00	41.64		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65,000,000.00		39,740,000.00	61.14	100.00	25,260,000.00	38.86		
	- Belanja Operasi	65,000,000.00	2	39,740,000.00	61.14	100.00	25,260,000.00	38.86		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,991,500.00		46,742,432.00	53.12	100.00	41,249,068.00	46.88		
	- Belanja Operasi	87,991,500.00	2	46,742,432.00	53.12	100.00	41,249,068.00	46.88		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,260,000.00		7,045,000.00	97.04	100.00	215,000.00	2.96		
	- Belanja Operasi	7,260,000.00	1	7,045,000.00	97.04	100.00	215,000.00	2.96		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258,881,500.00		213,012,674.00	82.28	100.00	45,868,826.00	17.72		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,634,000.00		61,664,000.00	91.17	100.00	5,970,000.00	8.83		
	- Belanja Operasi	67,634,000.00	2	61,664,000.00	91.17	100.00	5,970,000.00	8.83		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144,550,000.00		106,410,674.00	73.62	100.00	38,139,326.00	26.38		
	- Belanja Operasi	144,550,000.00	1	106,410,674.00	73.62	100.00	38,139,326.00	26.38		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,890,000.00		19,150,000.00	91.67	100.00	1,740,000.00	8.33		
	- Belanja Operasi	20,890,000.00	2	19,150,000.00	91.67	100.00	1,740,000.00	8.33		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,807,500.00		25,788,000.00	99.92	100.00	19,500.00	0.08		
	- Belanja Operasi	25,807,500.00	1	25,788,000.00	99.92	100.00	19,500.00	0.08		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									

NO	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.00	9	10
II	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,404,176,155.00		1,248,607,336.00	88.92	100.00	155,568,819.00	11.08		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,404,176,155.00		1,248,607,336.00	88.92	100.00	155,568,819.00	11.08		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,781,924.00		4,151,000.00	86.81	100.00	630,924.00	13.19		
	- Belanja Operasi	4,781,924.00	2	4,151,000.00	86.81	100.00	630,924.00	13.19		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300,852,344.00		273,080,236.00	90.77	100.00	27,772,108.00	9.23		
	- Belanja Operasi	300,852,344.00	7	273,080,236.00	90.77	100.00	27,772,108.00	9.23		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	881,358,703.00		803,663,780.00	91.18	100.00	77,694,923.00	8.82		
	- Belanja Operasi	881,358,703.00	14	803,663,780.00	91.18	100.00	77,694,923.00	8.82		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	217,183,184.00		167,712,320.00	77.22	100.00	49,470,864.00	22.78		
	- Belanja Operasi	217,183,184.00	7	167,712,320.00	77.22	100.00	49,470,864.00	22.78		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
III	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	28,049,325,009.00		27,989,175,814.00	99.79	100.00	60,149,195.00	0.21		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	28,049,325,009.00		27,989,175,814.00	99.79	100.00	60,149,195.00	0.21		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,860,672.00		4,543,500.00	93.47	100.00	317,172.00	6.53		
	- Belanja Operasi	4,860,672.00	3	4,543,500.00	93.47	100.00	317,172.00	6.53		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,250,000,000.00		1,227,870,000.00	98.23	100.00	22,130,000.00	1.77		
	- Belanja Operasi	1,250,000,000.00	1	1,227,870,000.00	98.23	100.00	22,130,000.00	1.77		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26,400,000,000.00		26,388,932,364.00	99.96	100.00	11,067,636.00	0.04		
	- Belanja Operasi	26,400,000,000.00	1	26,388,932,364.00	99.96	100.00	11,067,636.00	0.04		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	394,464,337.00		367,829,950.00	93.25	100.00	26,634,387.00	6.75		
	- Belanja Operasi	394,464,337.00	11	367,829,950.00	93.25	100.00	26,634,387.00	6.75		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									

NO	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.00	9	10
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1,013,175,560.00		1,007,833,992.00	99.47	100.00	5,341,568.00	0.53		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,013,175,560.00		1,007,833,992.00	99.47	100.00	5,341,568.00	0.53		
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,291,260.00		3,866,000.00	90.09	100.00	425,260.00	9.91		
	- Belanja Operasi	4,291,260.00	1	3,866,000.00	90.09	100.00	425,260.00	9.91		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	850,000,000.00		850,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
	- Belanja Operasi	850,000,000.00	1	850,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	158,884,300.00		153,967,992.00	96.91	100.00	4,916,308.00	3.09		
	- Belanja Operasi	158,884,300.00	6	153,967,992.00	96.91	100.00	4,916,308.00	3.09		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	450,000,000.00		432,113,398.00	96.03	100.00	17,886,602.00	3.97		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450,000,000.00		432,113,398.00	96.03	100.00	17,886,602.00	3.97		
	- Belanja Operasi	450,000,000.00	1	432,113,398.00	96.03	100.00	17,886,602.00	3.97		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	289,644,770.00		224,862,580.00	77.63	100.00	64,782,190.00	22.37		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	289,644,770.00		224,862,580.00	77.63	100.00	64,782,190.00	22.37		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90,720,000.00		60,990,000.00	67.23	100.00	29,730,000.00	32.77		
	- Belanja Operasi	90,720,000.00	1	60,990,000.00	67.23	100.00	29,730,000.00	32.77		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80,714,770.00		80,072,580.00	99.20	100.00	642,190.00	0.80		
	- Belanja Operasi	80,714,770.00	2	80,072,580.00	99.20	100.00	642,190.00	0.80		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	118,210,000.00		83,800,000.00	70.89	100.00	34,410,000.00	29.11		
	- Belanja Operasi	118,210,000.00	3	83,800,000.00	70.89	100.00	34,410,000.00	29.11		
	- Belanja Modal									
	- Belanja Tidak Terduga									
	- Belanja Transfer									

NO	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PAKET	REALISASI		FISIK (%)	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.00	9	10
	SUB TOTAL BELANJA DAERAH									
	- SUBTOTAL BELANJA OPERASI	35,115,978,988.00	101	34,122,638,299.00	97.17	100.00	993,340,689.00	2.83		
	- SUBTOTAL BELANJA MODAL	261,543,980.00	4	238,007,071.00	91.00	100.00	23,536,909.00	9.00		
	- SUBTOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- SUBTOTAL BELANJA TRANSFER	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL BELANJA	35,377,522,968.00	105	34,360,645,370.00	97.13	100.00	1,016,877,598.00	2.87		

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 1 dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan periode 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.1. Kesimpulan

Hasil Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tahun 2024 pada disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024, indikator Jumlah Konflik yang ditangani telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target 100% sehingga tercapainya IKU.
2. Indikator Nilai Sakip target yang ditetapkan yaitu predikat B dari target B sehingga capaian kinerja 100%.
3. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 34.360.645.370 atau sebesar 97,13% dari total anggaran Rp. 35.377.522.968.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
3. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.
4. Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku